



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jl. Udayana No. 22 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Telp (0370) 6163333

---

## **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019**

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian dari tugas BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan LHP atas LKPD tersebut kepada lembaga perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Oleh karena itu walaupun di tengah wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, BPK Perwakilan Provinsi NTB tetap menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan melalui sarana *Video Conference*.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2019 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Senin (4/05) bertempat di Ruang Rapat Lt.2 kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB melalui *Media Video Conference*. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2019 diserahkan oleh Kepala Perwakilan secara simbolis dengan menandatangani BAST secara bersama-sama dan menunjukkan LHP di hadapan kamera. *File* dari LHP LKPD, selanjutnya dikirimkan melalui surat elektronik kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui alamat *email* yang telah dikonfirmasi sebelumnya.

Acara dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (Bapak Kaharuddin Umar), Wakil Bupati Sumbawa Barat (Bapak Fud Syaiffudin, S.T.), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Bapak H. A. Aziz S.H., M.H.), serta Inspektur Kabupaten Sumbawa Barat (Bapak I Made Budi Artha S. Sos, M.M.).

Mengacu pada visi BPK menjadi pendorong pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat melalui rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan

BPK, pemerintah daerah diharapkan akan melaksanakan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2019, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Kabupaten Sumbawa Barat TA 2019. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk yang 6 kalinya (2014-2019).

Mataram, 4 Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Kepala,

Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA  
NIP 197104071996031002

